

Utang dan Gaya Hidup Rumah Tangga Miskin

WIHDAN HIDAYAT/REPUBLIKA



Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa *non-performing financing* (NPF) pada bank syariah terus mengalami peningkatan. Rasio tersebut mencapai puncak pada 2016 yang menunjukkan angka 5.1 persen. Sementara itu, pada bank pembiayaan rakyat syariah, angka tertinggi dicapai pada Agustus 2017 sebesar 10.8 persen (Ascarya, 2017). Utang merupakan sesuatu yang tidak diharamkan, namun orang yang berhubungan dengannya haruslah memenuhi paling tidak tiga syarat. Syarat pertama adalah memiliki komitmen untuk membayar; kedua, mampu mengukur utang sesuai dengan kemampuannya; ketiga, memiliki keinginan kuat untuk mengembalikan sekecil apapun besaran utangnya.

Cara berutang mungkin ditempuh oleh rumah tangga yang memang teresak untuk memnuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun, tidak jarang utang menjadi gaya hidup. Jika memang dana yang dimiliki mampu menutupi utang, hal ini bukan suatu masalah. Masalah muncul ketika utang dijadikan gaya hidup namun dana yang dimiliki tidak mampu menutupinya. Rumah tangga ini mungkin enggan mengukur kemampuan diri dan enggan berkorban untuk mampu bergaya hidup sesuai kemampuannya (bukan untuk memenuhi keinginan di luar kemampuan finansialnya).

Allah telah menggambarkan sifat manusia yang berkeluh kesah dan kikir dalam QS al-Ma'arij 19-21. Ketika kesusahan, manusia memiliki potensi untuk berkeluh kesah. Kadang sebagian keluh kesah ini diatasi dengan jalan pintas meminta-minta atau berutang. Sebaliknya, ketika sedang berkecukupan, manusia memiliki potensi untuk enggan berkorban alias pelit/kikir. Sehingga, kemudian ia justru mencari cara untuk terus menumpuk miliknya dan enggan berbagi.

Sebenarnya Allah juga memberikan solusi bagaimana mengatasi sifat tersebut di ayat-ayat sesudahnya: "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang

mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhan. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya). Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."

Dari ayat tersebut di atas, Allah memberikan solusi bahwa: pertama, seorang muslim harus mampu melaksanakan kewajiban shalatnya dengan istiqamah, tidak bolong-bolong. Kedua, bersedekah, zakat, infak, wakaf. Ketiga, mempercayai hari pembalasan. Keempat, takut akan datangnya azab Allah. Serta kelima, mampu menjaga izzahnya.

Dengan demikian, untuk mengatasi, terutama, masalah finansial kita, sebagai

Muslim seharusnya kita mengikuti saran dan solusi yang sudah Allah berikan. Lebih spesifik Allah menerangkan bahwa dalam harta kita ada hak orang lain. Keimanan seharusnya membawa kita pada sifat suka berbagi. Karena Allah tidak menyuruh eksklusif hanya kepada orang berharta banyak saja namun ia mampu bersyukur hartanya sehingga ia akan terus terdorong untuk terus berbagi sekecil apapun harta yang diamanahkan padanya.

Persepsi terhadap Utang

Dalam penelitian Arsyanti (2017) terhadap responden rumah tangga berpenghasilan rendah ditemukan bahwa secara demografis, kebanyakan responden tidak setuju bahwa utang adalah sebuah gaya hidup yang mampu memenuhi kebutuhannya. Namun ketika data dianalisis lebih jauh, ditemukan bahwa responden beranggapan bahwa utang mampu menambah kekayaan mereka dan mampu memberikan kepuasan hidup bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa utang secara kasat mata dilihat sebagai suatu materi, yang jika diperoleh terlihat akan mampu menambah harta kekayaan. Seharusnya sebelum melihat hal tersebut, seorang Muslim harus mempertimbangkan kewajibannya dalam mengembalikan utang tersebut.

Jika seorang Muslim mempertimbangkan kewajibannya terlebih dahulu, maka diharapkan ia akan lebih mampu merencanakan apa yang akan dilakukannya jika ia berutang. Ia akan mempertimbangkan kegiatan produktif dibanding konsumtif. Ia akan berusaha keras untuk mampu mengembalikan utangnya, dan berusaha sekeras mungkin menghindari kegiatan konsumtif dari sumber utang apalagi menjadikannya gaya hidup akibat memikirkan beban yang akan ditanggungnya.

Rumahtangga, dengan usia kepala keluarga yang lebih muda, tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan tingkat sedekah per penghasilan yang lebih tinggi, namun pesimis terhadap keadaan ekonomi masa depan rumah tangganya, kurang rajin dalam mengerjakan shalat lima waktu, dan memperoleh pembiayaan dari institusi formal, akan cenderung berutang secara terus menerus dibandingkan kelompok yang sebaliknya. Hal tersebut sebenarnya masih rasional

sebagaimana rumahtangga muda akan lebih membutuhkan banyak dana untuk memulai kehidupan rumahtangganya.

Demikian pula rumah tangga yang dikepalai oleh orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, mereka mungkin akan membutuhkan dana untuk menstabilkan kondisi keuangan rumahtangga. Yang menarik adalah ternyata mereka yang suka bersedekah dengan porsi sedekah lebih tinggi dibandingkan yang lebih rendah juga cenderung akan berutang. Bisa jadi karena utang dianggap sebagai gaya hidup. Disamping juga, mereka yang kurang rajin dalam menjalankan shalat lima waktu akan cenderung lebih suka berutang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa edukasi keuangan berpengaruh positif terhadap utang melalui sikap terhadap utang. Penghasilan berpengaruh positif terhadap utang melalui sikap dan pihak lain yang berpengaruh terhadap keputusan pengambilan utang. Institusi informal pemberi pembiayaan berpengaruh negatif melalui sikap, pihak lain yang berpengaruh, dan pengalaman. Institusi informal penyalur sedekah berpengaruh positif melalui sikap dan pihak berpengaruh, dan berpengaruh negatif melalui pengalaman.

Edukasi finansial berpengaruh positif melalui pihak yang berpengaruh dan berpengaruh negatif melalui pengalaman. Sikap dan pihak yang berpengaruh terhadap pengambilan utang berpengaruh positif, sementara pengalaman berpengaruh negatif terhadap niat untuk berutang.

Pengalaman dan niat untuk berutang berpengaruh positif terhadap pengambilan utang yang terus menerus. Pada akhirnya, pengambilan utang yang terus menerus berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan dan gaya hidup menurut persepsi rumahtangga berpenghasilan rendah.

Hal ini berarti bahwa meski pengalaman berkata tidak, namun lingkungan dan bentuk sikap dari rumahtangga berpengaruh positif dalam menentukan mereka untuk melanjutkan berutang atau tidak. Kondisi ini juga memengaruhi persepsi mereka terhadap utang yang mampu berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan dan gaya hidup mereka. Itulah mengapa rumahtangga yang suka bersedekah namun di sisi lain juga rajin berutang karena persepsi terhadap gaya hidup mereka. Wallahu 'alim. ■



Laily Dwi Arsyanti
Staf Pengajar
Departemen Ilmu
Ekonomi Syariah FEM
IPB

Tabel 1. Hasil Analisis Persepsi Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah terhadap Utang

	Sikap	Pihak Berpengaruh	Pengalaman	Niat	Kebiasaan Berutang	Kondisi Keuangan dan Gaya Hidup
Pendidikan	+					
Penghasilan	+	+				
Institusi Pembiayaan	-	-	-			
Institusi Sedekah	+	+	-			
Edukasi Keuangan		+	-			
Sikap				+		
Pihak Berpengaruh				+		
Pengalaman				-	+	
Niat					+	
Kebiasaan Berutang						+

TSAQOFI

Ekonomi Syariah dan Tahun Politik 2018



Dr Irfan Syaqui Beik
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Tahun 2018 tidak diragukan lagi adalah tahun politik yang sangat dinamis dan penuh tantangan. Data KPU menunjukkan bahwa tahun 2018 akan diselenggarakan pilkada di 171 daerah di seluruh Indonesia. Pergantian kepala daerah ini merupakan sebuah keniscayaan, dimana momentum pilkada menjadi sarana evaluasi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah yang ada, sekaligus menjadi ajang memilih kepala daerah yang dianggap dapat memenuhi aspirasi mereka.

Selain itu, pada tingkat nasional, diantara tahapan penting yang harus dilalui pada tahun 2018 ini adalah pengajuan calon anggota legislatif pada bulan Juli 2018, dan pengajuan calon presiden pada bulan Agustus 2018. Terlepas apakah nanti ada perubahan dari sisi waktu, namun dipastikan kedua proses tersebut akan sangat menguras energi bangsa ini. Tentu kita berharap bahwa semua proses politik tersebut bisa memberikan hasil yang optimal bagi bangsa Indonesia.

Dari perspektif ekonomi syariah, semua proses politik, baik di daerah maupun pada level nasional, diharapkan dapat mendorong peran yang lebih besar kepada institusi dan instrumen ekonomi syariah. Meski belum pernah ada survey mengenai persepsi calon kepala daerah dan bakal calon anggota dewan terhadap ekonomi syariah, namun penulis menduga bahwa tingkat literasi mereka terhadap ekonomi syariah masih sangat rendah. Dugaan ini tentu bukan tanpa sebab, tetapi didasarkan pada fakta yang ada.

Jika kita perhatikan, bahwa sejak tahun 2004 hingga saat ini, program-program di bidang ekonomi yang ditawarkan kepada publik oleh para caleg maupun para calon kepala daerah (cakada), masih sangat jarang yang menyentuh aspek penguatan ekonomi syariah. Seolah-olah "jualan" ekonomi syariah masih dianggap kurang menarik. Hanya sedikit partai, caleg dan cakada yang

menaruh perhatian pada ekonomi syariah, padahal instrumen ini memiliki potensi yang sangat besar.

Untuk membuktikan hal di atas, mari kita ambil contoh di bidang perzakatan. Hasil studi Pusat Kajian Strategis (Puskas) Baznas tahun 2017 ini di 28 provinsi dengan menggunakan IZN (Indeks Zakat Nasional) sebagai indikator, ditemukan fakta bahwa rata-rata nilai indeks regulasi dan indeks dukungan APBD masing-masing mencapai angka 0,29 dan 0,32. Skor tersebut jika didasarkan pada kriteria penilaian IZN (yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik) maka berada pada kriteria "kurang baik". Ini menunjukkan bahwa secara umum, perhatian pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov dan DPRD, masih sangat lemah terhadap pengelolaan zakat di daerahnya. Dukungan regulasi maupun dukungan APBD yang ada, masih jauh dari kata memadai.

Hal ini membuat Baznas di daerah banyak yang berjuang sendiri. Meski demikian, kinerja kelembagaan dan dampak pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas daerah terhadap kesejahteraan mustahik, menunjukkan angka yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja dukungan pemda dan DPRD-nya. Hal ini dapat dibuktikan dari rata-rata nilai indeks kelembagaan dan indeks dampak zakat terhadap mustahik, yang masing-masing mencapai angka 0,50 (kategori cukup baik) dan 0,65 (kategori baik).

Memang ada beberapa provinsi yang menunjukkan pengecualian, seperti Provinsi Aceh, yang memiliki indeks regulasi dan dukungan APBD sangat baik, dan Banten, yang memiliki indeks regulasi baik dan indeks dukungan APBD sangat baik. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa para kepala daerah beserta para anggota DPRD masih belum menganggap zakat ini sebagai bagian penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Ini adalah bukti bahwa literasi zakat pimpinan daerah, baik

eksekutif maupun legislatif, masih belum berada pada level yang diharapkan.

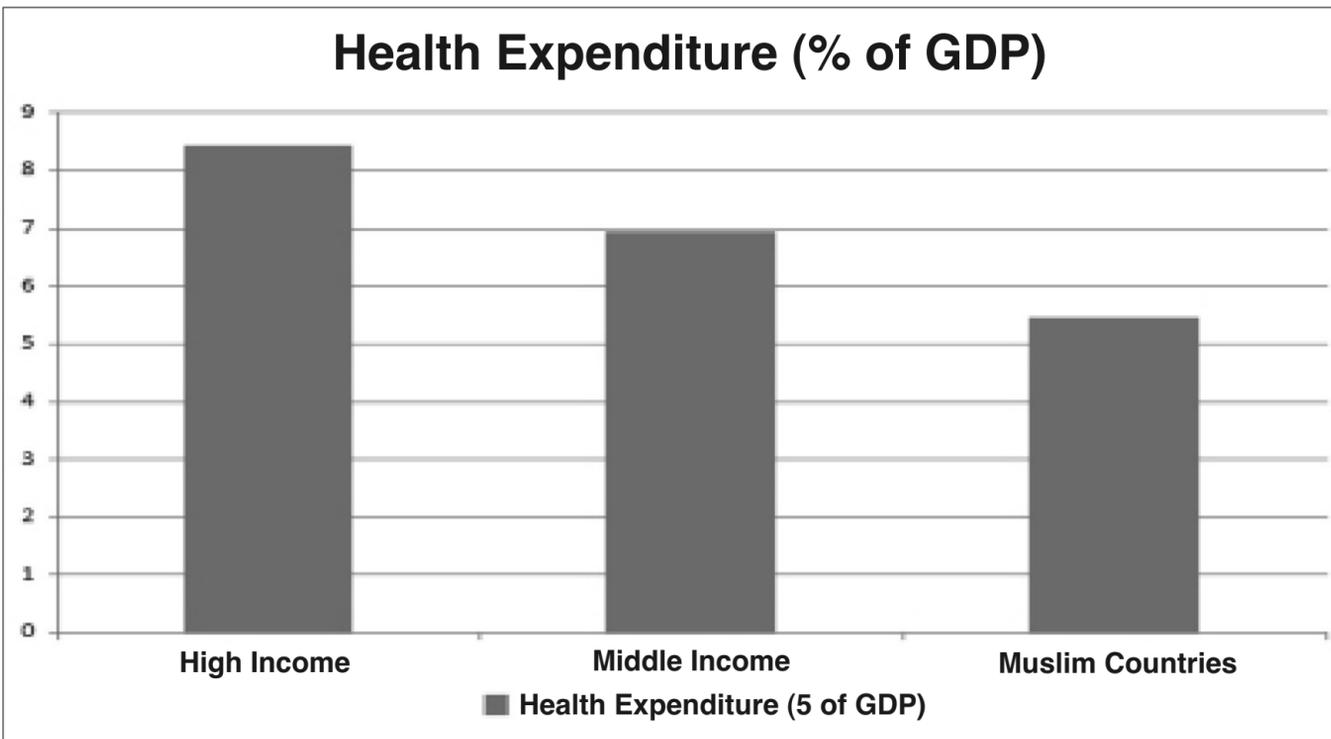
Contoh lain adalah di bidang perbankan syariah. Secara umum, dukungan pemerintah daerah terhadap perbankan syariah juga masih belum optimal. Baru Pemprov Aceh yang berani mengkonversi bank daerah miliknya menjadi bank umum syariah sehingga mendorong posisi aset perbankan syariah nasional di kisaran 5,3 persen. Mudah-mudahan rencana Pemprov NTB melakukan hal yang sama, dapat berjalan dengan baik di tahun 2018 ini. Selanjutnya, Pemprov Jabar juga terbukti mampu membesarkan Bank BJB Syariah sebagai bank syariah daerah yang kuat, meski masih memiliki induk yang konvensional.

Inilah potret realitas yang harus terus-menerus diperbaiki. Harus diakui bahwa ada sisi ideologis dari ekonomi syariah, yang membuat sebagian pihak di negeri ini menjadi antipati dan alergi, termasuk sebagian pemimpin politik. Namun yang juga perlu diperhatikan adalah adanya sisi pragmatis dari ekonomi syariah, yang kalau dikelola dengan baik, akan memberikan manfaat positif bagi perekonomian bangsa dan negara. Sisi pragmatisme inilah yang membuat banyak negara bukan Islam, seperti Inggris dan Singapura, yang mencoba memanfaatkan ekonomi syariah untuk kepentingan mereka sendiri.

Inilah tantangan bagi para pegiat ekonomi syariah untuk mengkomunikasikan potensi dan peluang ekonomi syariah kepada para pemimpin politik negeri ini. Para (bakal) caleg, cakada, bahkan capres mendatang, harus dapat diyakinkan bahwa sektor riil syariah (seperti industri makanan dan pariwisata halal), sektor keuangan syariah, dan sektor zakat dan wakaf, berpotensi untuk dijadikan sebagai instrumen yang bisa mengangkat derajat perekonomian daerah dan perekonomian nasional ke arah yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Wallahu 'alim. ■

Dampak Program Rumah Sehat Baznas

Gambar 1: Pengeluaran Kesehatan (persen of GDP)



A gama Islam sejatinya telah memuat berbagai peraturan yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan, di dunia maupun di akhirat. Dalam hal mengatasi ketimpangan sosial, Islam menyediakan berbagai solusi antaranya adalah melalui instrumen zakat dan wakaf.

Kata zakat berasal dari *zaka-yazku* yang berarti tumbuh atau berkembang. Zakat juga berarti baik atau suci, seperti kata dalam surah Maryam 19: 13. Secara istilah Imam Syafii mendefinisikan zakat adalah harta tertentu dengan sifat tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu, seperti yang dijelaskan dalam surah Attaubah ayat 60.

Sementara wakaf, secara harfiah berarti *al-Habsu* yang berarti menahan. Secara istilah Imam Nawawi dari mazhab Syafii mendefinisikan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang bisa diambil manfaatnya sekaligus menjaga bendanya, untuk tujuan kebajikan sebagai sarana *taqarrub ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah SWT).

Dari perspektif ekonomi, zakat dan wakaf merupakan instrumen penting yang perlu dikembangkan dalam pengentasan kemiskinan. Berbagai kajian telah menempatkan zakat dan wakaf pada posisi tawar yang tinggi untuk dijadikan instrumen penting dalam mengentaskan kemiskinan di negaranya.

Saat ini, sudah banyak jenis program yang telah didanai oleh zakat seperti memberikan pendidikan untuk orang miskin, pelatihan kejuruan bagi penerima zakat agar lebih produktif, pendirian industri rumahan, penyediaan aset dan peralatan untuk proyek usaha kecil, penyediaan modal kerja, pembangunan perumahan murah, penyediaan perawatan medis dan perawatan kesehatan.

Begitupun dengan wakaf melalui formasi wakaf produktif saat ini telah mendanai pembangunan rumah sakit, hotel, gedung-gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Melihat fungsi dan karakteristiknya yang saling melengkapi, Shirazi (2014) mengemukakan bahwa institusi zakat dan wakaf perlu diintegrasikan ke dalam strategi pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota Islamic Development Bank (IDB).

Menurut data, sebagian besar negara mayoritas Muslim pada umumnya lebih miskin daripada rata-rata negara lain. Sebagian besar kemiskinan berada di Afrika dan Asia dan sebagian besar negara mayoritas Muslim berada di benua ini. Diperkirakan 1,37 miliar populasi dunia dari total 7,1 miliar orang, hidup dengan pendapatan 1 dolar AS per hari. Di 57 negara anggota OKI, yang penduduknya mencapai 1,6 miliar orang, 31 persen diantaranya hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan sebesar 1,25 dolar AS per hari.

Jika kita melihat pengeluaran kesehatan sebagai persen dari PDB (lihat Gambar 1), negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim memiliki nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi dan negara-negara berpenghasilan menengah. Negara-negara mayoritas Muslim memiliki rata-rata ketersediaan infrastruktur kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan tinggi dan negara-negara berpenghasilan menengah. Ini sebagian karena pendapatan per kapita yang lebih rendah, menurunkan

alokasi pengeluaran kesehatan sebagai persen dari total pengeluaran dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara-negara mayoritas Muslim.

Rumah Sehat BAZNAS

Rumah Sehat Baznas (RSB) adalah salah satu program Baznas untuk memfasilitasi layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan juga membantu mengakomodasi orang miskin yang membutuhkan perawatan lebih lanjut ke rumah sakit yang lebih besar. RSB Baznas dibangun dengan menggabungkan dengan mengintegrasikan dana zakat dan lahan wakaf. Lahan dan bangunan dibiayai dengan dana wakaf, sedangkan fasilitas kesehatan, obat-obatan, gaji dokter, gaji perawat dan biaya operasional lainnya didanai sepenuhnya dengan dana zakat.

RSB Baznas sampai dengan tahun 2016 memiliki dua kategori fasilitas: Dalam Gedung dan Luar Gedung. Bentuk layanan kesehatan untuk orang miskin dalam gedung meliputi layanan: (1) Poli Umum, (2) Poli Rawat Inap, (3) Laboratorium, (4) Operasi Katarak Massa, (5) Radiologi, (6) Poli Gigi, (7) Kesehatan Ibu

dan Anak Poli, (8) Gedung Keluarga Sehat, (9) Spesialis Poli, (10) Pusat Hipertensi & Diabetes Poli, (10) Layanan Rujukan, (11) Psikologi Sosial, dan (12) Nutrisi Poli. Sedangkan layanan luar gedung, meliputi: (1) Mitra Keluarga Sejahtera, (2) Pusat Nutrisi, (3) Program Anak Sekolah yang Sehat, (4) Khitanan Massa, (6) Pusat Obat-obatan dan Hipertensi, (7) Komunitas Sehat, (8) Kader Sehat, (9) Pusat Tuberkulosis, (10) Puskesmas, (11) Unit Kesehatan Keliling, dan (12) Pusat Lansia.

Hingga 2016, Rumah Sakit Gratis BAZNAS telah berdiri di lima kota yaitu Jakarta, Yogyakarta, Sidoarjo, Makassar, dan Pangkalpinang dan telah melayani 213.469 orang miskin dengan rincian di Jakarta 52.429 orang, Yogyakarta 49.048 orang, Sidoarjo sebanyak 50.851 orang, Makassar sebanyak 53.848 orang dan Pangkalpinang 5.293 orang.

Dampak RSB

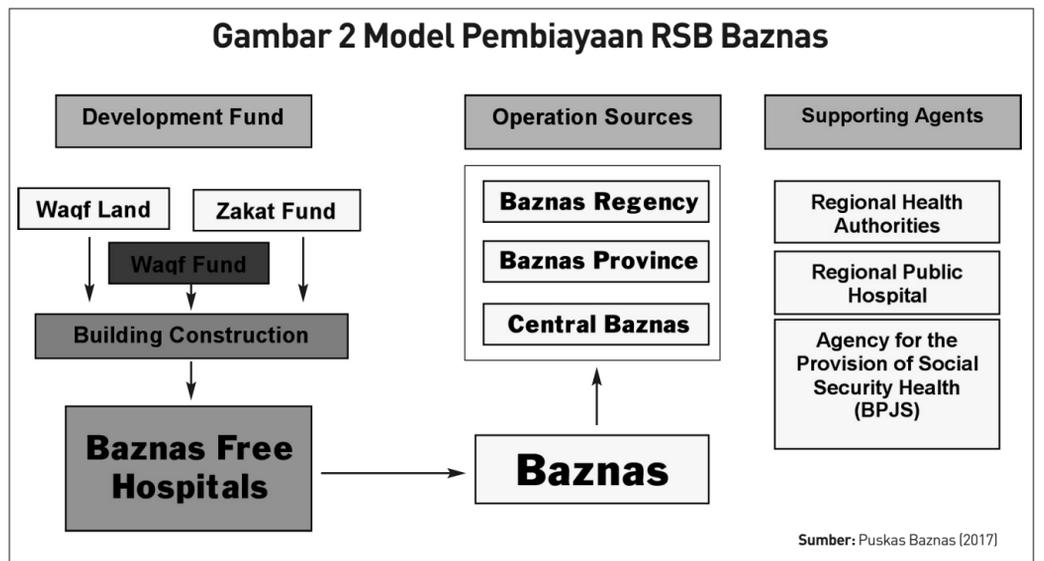
Pada tahun 2017, sebagai wujud pertanggungjawaban publik, Pusat Kajian Strategis Baznas (Puskas Baznas) melakukan survei. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan yang diberikan oleh Rumah Sehat Baznas (RSB). Survei ini dilakukan selama periode Mei-Juli 2017 kepada 400 penerima manfaat di empat cabang RSB (Jakarta, Makassar, Sidoarjo dan Pangkalpinang).

Berdasarkan survei yang dilakukan, mayoritas yang menerima layanan kesehatan gratis adalah perempuan. Berdasarkan klasifikasi umur, paling banyak adalah antara 46-60 tahun. Berdasarkan klasifikasi pekerjaan, kebanyakan dari mereka adalah ibu rumah tangga. Berdasarkan pendidikan, kebanyakan adalah lulusan sekolah dasar. Berdasarkan pendapatan pendidikan, paling banyak 500.000-1.000.000 per bulan. Berdasarkan anggota keluarga kebanyakan ada 1-5 anggota. Berdasarkan alasan memilih RSB paling banyak adalah karena layanan gratis.

Hasilnya dapat disimpulkan bahwa penerima manfaat rata-rata menyatakan kepuasannya dengan nilai rata-rata 4 (puas). Hasil survei ini menunjukkan bahwa proyek zakat dan wakaf seperti Rumah Sehat Baznas (RSB) yang dilakukan oleh Baznas telah terbukti memainkan peran penting dalam memenuhi tujuan pengentasan kemiskinan dan lebih jauh lagi yakni pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan global. Maka dari itu, dalam konteks negara Indonesia, kedepan perlu adanya integrasi yang lebih intens antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga pengelola zakat dan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga pengelola wakaf supaya kedua instrumen ini bisa lebih maksimal lagi dalam memainkan fungsinya. Wallahu a'lam. ■



Dr M Hasbi Zaenal
Wakil Direktur Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS bidang Publikasi dan Jaringan



Sumber: Puskas Baznas (2017)

TAMKINIA

Fintech dan Prospek Pasar Asuransi Syariah

Munculnya sistem asuransi yang bertlandaskan nilai-nilai Islami menjadi angin segar bagi industri perasuransian di tanah air. Sistem asuransi yang mengusung konsep *ta'awun* atau tolong menolong ini memiliki performa yang cukup baik akhir-akhir ini. Terbukti pada tahun 2017 perusahaan asuransi syariah di Indonesia mencapai angka 58 unit yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi syariah *full fledge* dan 46 perusahaan yang masih berupa unit usaha syariah.

Perkembangan asuransi yang cukup pesat tentu tidak terlepas dari kemampuan pelaku industri dalam melihat potensi pasar yang ada. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan asuransi syariah. Terlebih lagi dengan banyaknya populasi dan akselerasi ekspansi pasar yang

tinggi dari masyarakat kelas menengah menjadi modal dasar bagi Indonesia untuk menguatkan posisi sebagai motor perindustrian asuransi syariah global.

Prospek industri asuransi syariah diprediksikan akan terus mengalami peningkatan di masa yang akan datang. Ditambah dengan adanya peningkatan jumlah kaum menengah yang tentunya akan memperluas target pasar bagi industri asuransi syariah di tanah air. Terlebih lagi sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mulai paham akan pentingnya asuransi. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK dimana hasil menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap asuransi sebesar 15,76 persen.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat seperti sekarang ini, munculah berbagai macam terobosan baru di berbagai sektor. Salah satunya di sektor finansial, yaitu adanya *financial*

technology (fintech). Kemunculan era keuangan digital ini menyebabkan para pelaku bisnis terus berinovasi dengan melihat permintaan pasar dimana masyarakat memiliki kecenderungan untuk berlaku praktis dan efisien. Hal ini tentu akan memengaruhi pola perilaku mereka dalam menentukan pilihan terhadap suatu produk, termasuk produk asuransi syariah. Sehingga harapannya perusahaan asuransi syariah mampu melihat dan menangkap potensi yang ada.

Di era keuangan digital seperti sekarang, tingkat persaingan antar industri asuransi akan semakin ketat. Memasuki era ini perusahaan asuransi syariah harus siap bersaing untuk membuat layanan menjadi lebih mudah, biaya lebih murah dan proses yang cepat. Salah satu cara yaitu dengan menggandeng perusahaan fintech sebagai mitra guna memasarkan produk asuransi syariah. Sehingga

layanan asuransi yang berbasis teknologi ini akan membuat konsumen lebih mudah dalam memilih produk asuransi yang tepat dan lebih efisien bagi mereka.

Perusahaan fintech sebagai agregator dalam memasarkan produk asuransi syariah diharapkan akan membantu mengembangkan industri asuransi syariah di tanah air. Terlebih lagi dalam kurun waktu mendatang dapat diprediksikan generasi milenial yang akan mendominasi pasar, sehingga adanya insurtech (layanan asuransi berbasis teknologi) ini menjadi salah satu strategi untuk mendorong outreach asuransi syariah yang sekarang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Tentu saja hal ini sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah untuk memberikan paket kebijakan dan regulasi yang bisa dijadikan stimulus dalam melakukan ekspansi pasar. ■



Dr Jaenal Effendi
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB